

INDEF POLICY BRIEF No. 02/2024

TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TRANSISI ENERGI INDONESIA UNTUK PRESIDEN BERIKUTNYA

Januari 2024

Berly Martawardaya¹, Tata Mustaya²¹Direktur Riset The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia²Senior Campaign Strategist of Greenpeace International and Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**LATAR BELAKANG**

Indonesia dihadapkan pilihan apakah kita mengabaikan peringatan alam yang jelas dan menunda mengerjakan yang sulit (dengan biaya lumayan tinggi), atau kita percepat implementasi berbagai pekerjaan rumah yang lama tertunda untuk mendapat manfaat jangka panjang.

Pada tahun 2009, Presiden Megawati mengadakan rapat kabinet bawah air pertama di dunia dengan perlengkapan scuba untuk menyoroti fakta bahwa dalam beberapa dekade Sebagian besar negaranya akan berada dibawah laut jika kenaikan permukaan laut terus membuat gunung es di kutub mencair. Megawati dan beberapa negara di kepulauan Pasifik sudah menyiapkan rencana untuk merelokasi penduduknya ke negara lain.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beberapa pulau lebih besar dengan wilayah tinggi dan pegunungan. Namun, simulasi menunjukkan selain pulau-pulau kecil, sebagian besar wilayah pantai utara Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan akan terendam air jika permukaan laut naik lima meter, (perkiraan konservatif jika tren berlanjut) pada tahun 2050. Riset harian Kompas pada tahun 2021 terungkap bahwa pada tahun 2050, 199 kota seluas 118.000 hektar akan terkena dampak banjir rob musiman. Hal ini akan berdampak pada 8,6 juta orang dan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp 1,576 triliun.



Gambar 1. Perumahan dikelilingi banjir rob di Pekalongan, Jawa Tengah

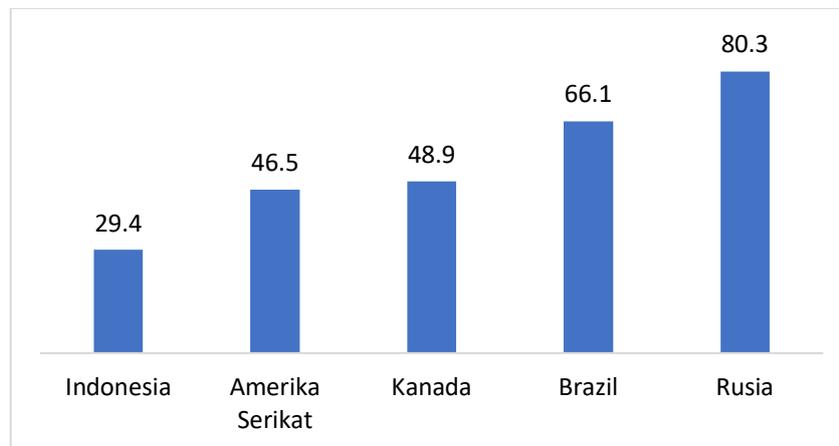
Sumber: [Kompas Cetak \(https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/20/ancaman-tenggelamnya-kota-kota-pesisir-di-indonesia\)](https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/20/ancaman-tenggelamnya-kota-kota-pesisir-di-indonesia)

KONDISI SAAT INI

Indonesia bukan hanya diamanatkan untuk berperan serta dalam perdamaian dunia dalam pembukaan UUD 1945 tapi juga berkepentingan, bahkan kewajiban, untuk melindungi warganya dengan mengambil tindakan mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi, dan melakukan transisi menuju pembangunan berkelanjutan (juga dikenal sebagai ekonomi rendah karbon atau ekonomi hijau).

Anak-anak saat ini akan menanggung beban paling berat akibat perubahan iklim dan masalah lingkungan seperti akses terhadap air bersih, rendahnya hasil pertanian, dan meningkatnya bencana alam. The Global Carbon Budget menemukan bahwa pada tahun 2022, Indonesia merupakan penghasil karbon terbesar kelima (termasuk perubahan penggunaan lahan) setelah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Rusia. Cukup mengkhawatirkan, ketika negara-negara maju menunjukkan tren penurunan emisi, Indonesia bersama Tiongkok dan India justru menunjukkan tren peningkatan.

Global Forest Watch melaporkan bahwa selama tahun 2001 - 2022, Indonesia kehilangan 29,4 juta hektar hutan primer yang menempatkan kita pada tingkat deforestasi tertinggi kelima setelah Rusia, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat. Selama masyarakat mendapatkan lebih banyak manfaat dengan menebang hutan untuk dijadikan kayu dan mengubah bekas kawasan hutan menjadi perkebunan, pertanian dan perumahan maka sulit untuk mengurangi deforestasi. Insentif tersebut perlu diberikan, sehingga masyarakat mendapatkan lebih banyak keuntungan finansial dengan melindungi hutan.



Gambar 2. Kehilangan Tutupan Hutan 2001-2022 (Mha)

Sumber: Global Forest Watch (<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/?category=forest-change>)

KTT Iklim PBB ke-28 di Doha (juga dikenal sebagai COP 28) menyerukan semua pihak untuk berkontribusi pada upaya global mengatasi perubahan iklim, termasuk “transisi dari bahan bakar fosil ke dalam sistem energi, dengan cara yang adil, teratur dan merata, mempercepat tindakan dalam dekade kritis ini, untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050 sesuai dengan ilmu pengetahuan.” Sebagai salah satu pihak dan penandatangan, Indonesia perlu menunjukkan kemajuan nyata dan menjaga komitmennya untuk menghentikan krisis iklim.

Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 yang sedang dibahas di DPR menargetkan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Presiden berikut jangan sampai terjebak seakan-akan harus memilih antara ekonomi atau lingkungan. Sebaliknya, tidak akan ada kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia tanpa perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

LANGKAH STRATEGIS

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan presiden mendatang antara lain adalah meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tanpa menebang hutan (hasil hutan non kayu) dengan komoditas seperti madu, rotan, dan obat-obatan tradisional. Pariwisata berkelanjutan juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal yang dapat dipersiapkan dengan dukungan pemerintah daerah. Sumber pendapatan lainnya adalah pembayaran jasa ekosistem (*payment for ecosystem services*) yang merupakan skema di mana masyarakat sekitar yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan tersebut memberikan kompensasi finansial bagi masyarakat yang melakukan aktivitas untuk memeliharanya.

Langkah strategis kedua adalah mengimplementasikan kesepakatan COP 28 untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil. Indonesia perlu meningkatkan *fit-in-tariff* (FIT) untuk energi terbarukan sambil menghentikan pembangkit listrik berbasis batu bara yang mengeluarkan emisi tingkat tinggi dan polutan

berbahaya dengan dukungan internasional seperti Just Energy Transition Program (JETP) dan pendanaan dari pasar seperti obligasi ramah lingkungan (*Green and Sustainable Bonds*). Tidak ada ruang untuk penambahan pembangkit listrik tenaga batubara.

Presiden berikutnya harus mengambil tindakan tegas dan memberlakukan pajak karbon (yg telah beberapa kali ditunda) tidak hanya untuk pembangkit listrik tetapi juga untuk industri yang tinggi intensitas energi dalam proses utamanya seperti semen, baja dan smelter kecuali menggunakan energi ramah lingkungan. Kita juga perlu meningkatkan penelitian untuk mengurangi biaya energi baru dan terdepan seperti teknologi energi gelombang (*wave energy*) yang menangkap pergerakan laut dan air laut untuk menghasilkan listrik dan mengoptimalkan potensi besar energi surya yang kian ekonomis.

Ketiga, pembangunan berkelanjutan perlu kembali menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Kearifan lokal berbagai suku di Indonesia penuh dengan rasa hormat terhadap lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kita perlu mempelajari kembali kebijaksanaan yang hamper hilang tersebut dan mengintegrasikannya dalam sistem perekonomian Indonesia. penelitian oleh J.J. Meijer et al., (2021) menempatkan Indonesia sebagai pencemar laut terbesar kelima setelah Filipina, India, Tiongkok, dan Malaysia. Prinsip ekonomi sirkular dan ESG (Environment, Social & Governance) perlu menjadi landasan pembangunan Indonesia untuk meminimalkan limbah hasil produksi yang lalu menjadi tumpukan sampah di darat atau laut. Sektor usaha perlu memiliki Extended Producer Responsibility (EPR) dimana perusahaan tidak hanya fokus di berproduksi tapi juga merencanakan serta melaksanakan pengumpulan, dan daur ulang limbah yang menjadi bagian dari prosedur operasi standar.

Keempat, pandangan anak-anak kita harus diperhitungkan dalam keputusan pembangunan dan investasi yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan dan iklim. Pada COP 28 di Dubai, di antara seratus delegasi pemuda terdapat Erwin Mahendra Eka Saputra (22) dan Nasywa Adivia Wardana (16) yang menyuarakan keprihatinan mereka atas masalah yang terus berlanjut yang berdampak pada layanan publik penting bagi anak-anak jika bencana terkait iklim seperti kebakaran hutan dan banjir besar semakin meningkat. Generasi penerus bangsa berhak untuk ikut serta dalam perumusan mitigasi krisis iklim.

Indonesia terdampak secara signifikan dari krisis iklim. Kenaikan permukaan laut akan mempengaruhi kehidupan jutaan penduduk pesisir dan kekeringan serta bencana alam akan merugikan jutaan petani. Sulit membayangkan kemakmuran Indonesia tanpa tindakan iklim yang memadai. Global Action Tracker pada 2023 menilai bahwa Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia masih sangat kurang (*Critically Insufficient*) sehingga jika tidak ada perubahan akan memperparah pemanasan global.

Presiden Indonesia periode 2024-2029 perlu bergerak cepat untuk melakukan akselerasi menuju pembangunan berkelanjutan yang energi terbarukan adalah bagian penting. *Let's leave a better Indonesia for our children.*